

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 2 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK HOTEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa semakin meningkatnya usaha perhotelan dan penginapan di Kabupaten Banggai maka perlu diadakan penertiban penyelenggaraan perhotelan secara intensif ;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, dimana sebagian objek pajak hotel belum diatur didalamnya, maka terhadap peraturan daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822 ) ;
  3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2002 Nomor 4 Seri B Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**dan**

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL.**

### **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2002 Nomor 4 Seri B Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah serta diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 9a dan angka 10 di ubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Kas daerah adalah kas daerah kabupaten banggai;
8. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan hotel;
9. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;

- 9a. Rumah Penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum;
10. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang di tetapkan oleh Kepala Daerah;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya di singkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Hotel di pungut Pajak atas setiap pelayanan di hotel.
- (2) Obyek Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, yang meliputi :
  - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek, antara lain :
    1. Gubuk pariwisata (*cottage*);
    2. Motel;
    3. Wisma pariwisata;
    4. Pesanggrahan (*hostel*),
    5. Losmen;
    6. Rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar minimal 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan failitas seperti rumah penginapan.
  - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
  - c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
  - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

3. Pada Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 32**

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya pada Pasal 2 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Agustus 2009

**BUPATI BANGGAI,**

**MA'MUN AMIR**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**MUSIR A. MADJA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 4**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 2 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK HOTEL**

**I. UMUM**

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu sumber Pendapatan berasal dari Pajak Daerah dimana diharapkan sumber pendapatan tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya usaha perhotelan dan penginapan di Kabupaten Banggai maka perlu diadakan penertiban penyelenggaraan perhotelan secara intensif serta memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, dimana sebagian objek pajak hotel belum diatur didalamnya, maka terhadap peraturan daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan pengertian tentang hotel sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I Cukup Jelas

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pelayanan Penunjang dimaksud sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, meliputi antara lain telepon, faksmile, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya.

Huruf c

Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum adalah meliputi antara lain pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tennis, golf, karaoke, puf, diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

Berdasarkan semangat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu berupa penerimaan pajak daerah. Hal tersebut diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus ruma tangganya sendiri.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dimaksud dengan cara melakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi produk hukum yang mengatur dibidang penerimaan khususnya Pajak Daerah.

Dalam hal penyempurnaan regulasi Peraturan Daerah tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai Pelaksanaan dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan penyusunan peraturan daerah.

Selanjutnya dengan memperhatikan keberadaan terbentuknya Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel yang dilandasi berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana saat ini telah mengalami perubahan dengan berlakunya Undang – Undang 34 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingganya dengan kondisi yang demikian sangat perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah ini, yang nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi instansi pengelola dalam penerapan dasar hukumnya.